

Notulensi Diskusi Publik

Hotel Cemara Jakarta, 24 September 2014



Menarik Pembelajaran Dari Program Pemantauan Pileg dan Pilpres 2014 dengan Menggunakan Internet dan media Sosial

Walau pemilu sudah selesai, namun masih meninggalkan sejumlah pembelajaran yang tak boleh dilupakan. Salah satu pembelajaran berharga dari proses Pemantauan pemilu oleh warga negara adalah kecurangan-kecurangan pemilu itu dapat ditembus oleh pengawasan warga melalui instrumen TIK. SatuDunia dengan www.pemilubersih.org telah memfasilitasi warga untuk terlibat dalam mengawasi proses pemilu 2014. Ada beberapa temuan dari 9 jenis kecurangan yang dilaporkan warga, dan sudah dilaporkan ke Bawaslu. Beberapa inisiatif lain seperti Matamassa, PantauPemilu, kawalpemilu menunjukkan bahwa pemantauan langsung oleh warga memiliki potensi untuk mengungkapkan kecurangan dan membangun proses pemilu yang lebih transparan. Disamping itu SatuDunia juga menemukan bahwa pelanggaran dilakukan juga oleh media (lihat www.iklanacapres.org). Ini berarti bukan hanya semua Partai Politik, tetapi Media juga melakukan pelanggaran. Disisi lain, saat ini sedang berkembang usulan untuk menyelenggarakan Pilkada tidak langsung, melalui RUU Pilkada. RUU ini mengusulkan Pilkada tidak langsung, yaitu dipilih melalui DPRD yang menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana proses Pilkada tidak langsung tsb dapat menjamin transparansi yang sudah dirasakan oleh masyarakat selama Pilpres 2014?



Diskusi Publik

Pembicara

LIPI (Syamsudin Haris)

JPPR (Muhammad Afifuddin)

Bawaslu (Daniel Zuhron)

Satudunia (Anwari Natari)

Rini Nasution selaku **Direktur SatuDunia** memberikan sambutan. Selain ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir. Disampaikan juga Pemilu 2014 memang sudah selesai, pemilu kemarin banyak sekali pelanggaran masih banyak catatan, masih banyak proses pembelajaran, masih banyak aktor aktor demokrasi yang lain misalkan parpol banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi masih butuh peran warga selain bawaslu untuk memantau.

SatuDunia melihat pentingnya melakukan proses reflektif, untuk menarik pembelajaran (Lessons learned) dari program Pemantauan Pelanggaran Pemilu (pileg dan Pilpres) 2014 dengan menggunakan internet dan media sosial.

SatuDunia akan melakukan proses pemantauan dua hari lagi, walaupun besok Pilkada diadakan secara langsung atau secara tidak langsung kita berharap adanya transparansi, kami berharap Presiden baru lebih menekankan kepada kebijakan-kebijakan kepada Parpol yang banyak melakukan pelanggaran, kita berharap pelanggaran tidak akan berulang lagi.

Diskusi publik ini di moderatori oleh **Ratna Arianti** dari **AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia)**.

Anwari Natari - Satu dunia (Narasumber): Mengajak Anak Muda Aktif Mengawasi (Pembelajaran)

Satu dunia memantau pemilu melalui media sosial, satudunia setelah pilpres mengembangkan positioning lain khususnya untuk anak muda, dengan mengakomodasi anak muda untuk peduli pemilu.

Anak muda sekarang banyak yang menggunakan, memanfaatkan smartphone untuk memantau pemilu secara online karena mereka lebih banyak memanfaatkan media social / media online. Kita mengajak dan mengundang anak muda supaya ngok dulu ke urusan pemilu supaya datang ke TPS baru kemudian memantau melalui media sosial, harapannya adalah supaya anak muda bisa aktif memberikan feedback yang positif, Mudah-mudahan ini bisa membuat anak muda mau untuk memantau pemilu melalui online,

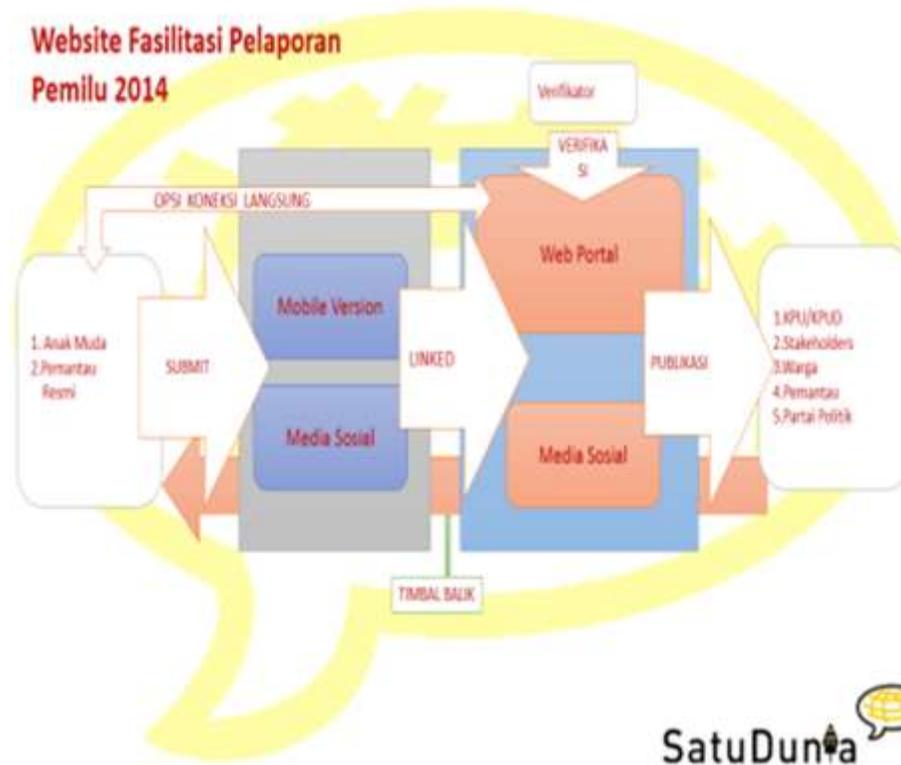


Diskusi Publik

Cara mengajak anak-anak muda supaya tertarik dengan pemilu adalah dengan aktifitas :

1. Launching dan Talk Show tentang Web Pemantauan Pemilu 2014
2. Menyusun Mekanisme Verifikasi (Masalah Online)
3. Membangun Website Portal Fasilitas
4. Menggelar Lomba Menulis Laporan
5. Menynergikan Website dengan Media Sosial

Output utamanya Sbb



Melalui Saluran Promosi

- **Menggelar Lomba Menulis Laporan Lapangan seputar Pemilu 2014**
Dengan dua kategori peserta:

- 1) Wartawan media mainstream.
Menulis in-depth report kecurangan atau potensi kecurangan.
- 2) Pegiat jurnalisme warga.
Menulis laporan/berita kecurangan atau potensi kecurangan.
Kemudian Peserta mengikutsertakan tulisannya ke website Pemantauan Pemilu 2014

- **Menggelar Lomba Tweet dan Instagram tentang Harapan Anak Muda pada Pilpres**

- (1) Usia 17-25 tahun
- (2) SMA, Mahasiswa, & First Jobber
- (3) Twitter: Follow @satuportal dan tulis hastag #pilpresbersih
- (4) Instagram: Follow @pantaupemilu14 dan tulis hastag #pilpresbersih
- (5) Berhadiah powerbank

1. Media Sosial
2. Email
3. Milis
4. Leaflet ke Persma-persma
5. Press Release
6. Kerja sama dgn mitra-mitra berisu anak muda.
7. Baner Online di Website-website
8. Acara Peluncuran Website
9. Radio Komunitas
- 10.

Dengan Daerah target adalah :

1. Jawa barat
2. Jawa tengah
3. Yogyakarta
4. Bali
5. Sumatera utara

Cara Menjangkau Anak Muda dengan :

- Menyusun Strategi Komunikasi Pelibatan anak muda dan Pilpres
- Membuat tagline untuk program pemantauan Pilpres oleh anak muda

Cara Menjangkau Anak Muda Dengan:

- Menyusun Strategi Komunikasi Pelibatan Anak Muda pada Pilpres
- Membuat Tagline untuk program pemantauan Pilpres oleh Anak Muda

Strategi komunikasi lain :

- Leaflet yang 'lebih muda'
- Lomba nge-tweet
- Desiminasi lewat sosmed
- Penyesuaian bahasa
- Kerja sama dengan lembaga lain

melalui Berbagai Media :

- Face book = 3 kasus
- Twitter = 24 kasus
- Website pemilubersih.org = 19 kasus
- Sms = 16 kasus

Aduan Melalui Facebook

- Laporan untuk Politik uang = 3 aduan
- Penyalah gunaan wewenang =1 aduan
- Terusan dari media massa = 3 kasus

Aduan Melalui Twitter :

- Pelanggaran jelas = 1 kasus
- Masalah logistik pemilu = 2 kasus
- Kacaunya pendataan KPI = 2 kasus
- Indikasi manipulasi suara = 2 kasus
- Politik Uang = 8 kasus
- Penyalah gunaan wewenang = 9 kasus
-

Aduan Melalui SMS :

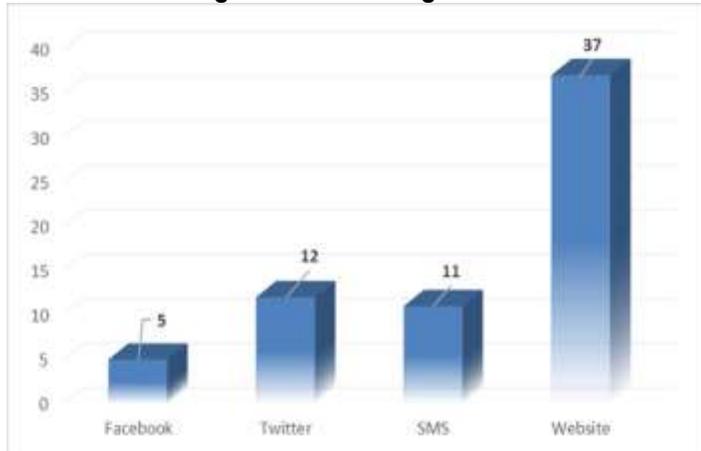
- Masalah Logistik pemilu = 1 kasus
- Politik Uang = 4 kasus
- Masalah Kepanitiaan KPPS = 4 Kasus
- Penyalahgunaan wewenang = 1 kasus
- Manipulasi Suara = 1 kasus
- Lain-lain 5 kasus

Rekap Aduan Warga semasa Pileg 2014 / Total Aduan Warga



Rekap Aduan Warga semasa Pilpres 2014 :

Total Aduan Warga Melalui Berbagai Media



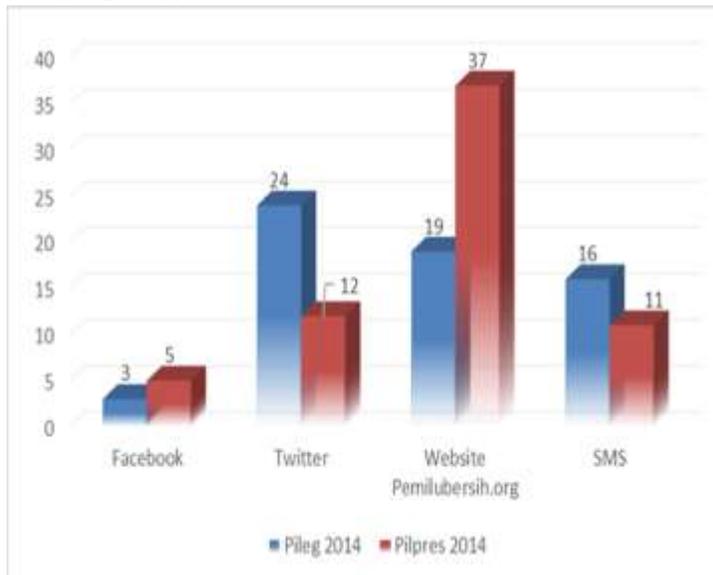
Aduan Melalui Facebook :

- Kekerasan dalam pemilu dan penyalahgunaan kekuasaan = 2 kasus
- Administrasi = 1 kasus
- Kampanye negatif = 1 kasus
- Lain-lain = 1 kasus

Aduan Melalui Twitter :

- Manipulasi suara = 1 kasus
- Money politik = 3 kasus
- Logistik pemilu = 3 kasus
- Administrasi = 1 kasus
- Kekerasan pemilu = 1 kasus
- Lain-lain = 3 kasus

Aduan Warga Pada Pileg 2014 dan Pilpres 2014 Program Pemilu Bersih :



Ratna Arianti (AJI) sebagai Moderator juga menyampaikan bahwa biasanya ada namanya key person yaitu dengan mengganti pulsa warga untuk melakukan update, aduan, pemantauan pemilu melalui media social, selanjutnya moderator mempersilahkan Bapak Muhammad Affifudin dari JPPR

Muhammad Afifuddin (JPPR) – Narasumber : (Mengawasi Iklan Kampanye Para Caleg: Pembelajaran) :

- Untuk iklan kampanye susah sekali untuk diawasi karena peserta pemilu melakukan pemanfaatan teknologi informasi.
- Cara pengaduannya pemantauannya banyak mengandung unsur sampah-sampah media social, didunia medsos, security sistem alat bantu sendiri juga susah diverifikasi, pemanfaatan teknologi informasi juga sangat rawan, pembekalan pemantauan untuk anak-anak muda, soal pendidikan pemilihnya.
- Contoh pemilu kemarin kita menemukan pelanggaran ada amplop berisi uang dan voucher asuransi sehingga para relawan sangat susah menindaklanjuti karena masyarakat sendiri mengambilnya, kita berharap bisa ditindaklanjuti oleh bawaslu.
- Keramaian media sosial sangat ramai sekali pendidikan pemilu untuk pemilih anak muda melalui media sosial sangat efektif.
- Problem kita bagaimana mengajak masyarakat kita mau terlibat untuk mengawasi pemilu seperti yang dilakukan satudunia.
- Sekarang bagaimana masyarakat kita dikembalikan lagi kepercayaan diri nya, dengan banyaknya pelanggaran masyarakat jadi ragu sebagai contoh kasus rekapitulasi online. Bisa saja tidak akurat karena misal tiba-tiba mati lampu atau internet down dll,
- KPU menerima bahan mentah dari TPS kemudian diolah dan data dapat diakses oleh masyarakat dan masyarakat dapat men tracking data.
- Dengan memanfaatkan teknologi, anak muda bisa mengawasi para caleg misal apakah caleg-nya adalah koruptor dll,
- Dibutuhkan perform bawaslu juga untuk supaya tidak ketinggalan teknologi dan melakukan pemantauan dana kampanye.

Kenapa Memantau Dana Kampanye?

1. Dana kampanye elemen penting untuk melihat akuntabilitas pemilu, terutama akuntabilitas keuangan.
2. Dana kampanye pemilu adalah sumber pembelanjaan kampanye yang dapat dikaitkan dengan kepentingan politik aktor-aktor yang bersaing di dalam pemilu.
3. Korupsi pemilu bisa bermula dari dana kampanye.
4. Penerimaan sumbangan dan belanja kampanye menjadi bagian penting yang harus dipantau untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
5. Pentingnya pemantauan dana kampanye untuk mendorong masyarakat dalam mengawal Pemilu yang akuntabel.

FOKUS PEMANTAUAN JPPR :

1. Rekening khusus dana kampanye
2. Kewajiban pembukuan dana kampanye
3. Batas sumbangan dana kampanye
4. Kewajiban Pelaporan Rekening Khusus, Periodik, Awal dan Akhir Dana Kampanye.
5. Larangan Peserta Pemilu Terkait Dana Kampanye
6. Verifikasi laporan dana kampanye dengan hasil pemantauan dari belanja aktual
7. Audit dana kampanye

HASIL PANTAUAN:

1. Dalam pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu di temukan fakta bahwa seluruh partai politik yang mendaftarkan tidak menyerahkan syarat wajib rekening dana kampanye yang diatur sebagai syarat dalam pendaftaran peserta pemilu, hal ini disebabkan tumpang tindihnya peraturan dalam undang-undang yang membolehkan penyerahan rekening dana kampanye sampai pada 14 hari sebelum masa kampanye terbuka.
2. Laporan dana kampanye peserta Pemilu hanya memenuhi kewajiban kepatuhan waktu pelaporan sedangkan laporan dana kampanyenya tidak sesuai dengan pedoman pelaporan dana kampanye yang diatur dalam peraturan KPU.
3. Dalam laporan penerimaan sumbangan I dari 6607 caleg terdapat 18% yang tidak melaporkan

sumbangan I dan II kepada partai politik berjumlah 7%, ketidakpatuhan Caleg dalam pelaporan dana kampanye karena tidak adanya sanksi bagi Caleg yang tidak melaporkan.

Dugaan manipulasi pencatatan sumbangan:

Penelusuran penyumbang

1. Masih buruknya kualitas pelaporan dari Partai Politik masih belum menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye Pemilu 2014 di sisi publik.
2. Kesan tidak transparan terutama terkait identitas penyumbang dapat terkena sanksi sesuai dengan Undang-undang Pemilu, terutama terkait penyumbang yang tidak jelas seperti diatur di dalam larangan penerimaan dana kampanye (Pasal 139 ayat (1)) UU No. 8 tahun 2012).
3. Pencantuman jumlah sumbangan kandidat dengan kategori jasa dipertanyakan karena tidak jelas perhitungan jasanya, dan berindikasi tidak akan disertakan di dalam rekening khusus dana kampanye parpol.

Laporan Total Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Periode I dan II

No	Partai Politik	Total Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I	Total Laporan Penerimaan Sumbangan Periode II	Total	Keterangan
1	Gerindra	184,580,579,070	121,883,763,169	306,464,342,239	Jumlah total
2	Demokrat	139,091,134,444	129,008,333,509	268,099,467,953	laporan
3	Hanura	136,852,137,926	104,977,443,039	241,829,580,965	penerimaan
4	PDIP	130,842,436,120	90,624,653,205	221,467,089,325	sumbangan
5	Golkar	75,037,763,861	97,134,911,950	172,172,675,811	periode I dan II
6	PAN	86,342,968,557	84,596,799,407	170,939,767,964	yang bersumber
7	PKB	54,204,938,236	96,418,521,662	150,623,459,898	dari partai politik,
8	Nasdem	41,186,935,500	98,390,669,363	139,577,604,863	caleg dan
9	PPP	45,058,531,231	51,712,645,787	96,771,177,018	sumbangan dari
10	PKS	32,481,388,426	49,881,015,868	82,362,404,294	pihak lain (bagi
11	PBB	29,654,547,785	19,517,816,366	49,172,364,151	partai politik yang
12	PKPI	19,682,719,813	14,619,135,099	34,301,854,912	menerima)

Jumlah penerimaan sumbangan didominasi oleh penerima sumbangan dari partai politik dan caleg. Laporan ini sama sekali tidak menggambarkan laporan penerimaan sumbangan dan pembukuan dana kampanye. Partai politik hanya mencatat berapa jumlah pengeluaran calegnya saja. Sedang partai politik yang menerima sumbangan dari pihak lain seperti: Hanura, PAN, Nasdem, PKS, jumlah sumbangan masih didominasi dalam bentuk barang dan buka uang.

Pemantauan Belanja dana kampanye parpol :

No	Partai Politik	Total Penerimaan	Total Pengeluaran
1	NASDEM	78,347,025,989	78,831,580,900
2	PKB	145,966,440,940	32,073,338,676
3	PKS	81,379,635,764	78,504,484,195
4	PDI-P	205,751,795,002	207,039,025,439
5	GOLKAR	150,071,527,722	219,107,291,583
6	GERINDRA	210,691,081,795	210,692,341,795
7	DEMOKRAT	267,879,517,424	267,860,106,723.89
8	PAN	142,226,567,418	130,931,883,782
9	PPP	57,953,479,461	98,225,535,574
10	HANURA	104,719,943,039	100,902,992,039
14	PBB	18,410,733,366	18,207,973,221
15	PKPI	-	-

Kejanggalan laporan terjadi pada partai Golkar, Nasdem, PDI, Hanura, yang mana jumlah pengeluaran (belanja kampanye) lebih banyak dari jumlah penerimaan sumbangannya.

- Pemantauan atas audit dan hasil audit

1. KPU menunjuk KAP setelah KAP mengikuti proses lelang di LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah).
2. Lima KAP di tingkat pusat baru selesai lelang ketika hari penyerahan laporan dana kampanye peserta pemilu
3. Hasil pemantuan JPPR setiap partai politik yang menyerahkan laporan hanya diperiksa dokumennya saja, seharusnya KPU Provinsi dan KAP memeriksa secara detail kelengkapan bukti disetiap dokumen pelaporan.
4. Khusus di Provinsi Maluku pada tanggal 24 April 2014, KAP belum selesai lelang sehingga hanya KPU Provinsi Maluku yang menerima laporan dana kampanye partai politik.
5. KPU tidak mempunyai telaah laporan awal dana kampanye terkait kejanggalan dan kekurangan yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk, bilamana terdapat kejanggalan atau kekurangan dari laporan awal dana kampanye dapat dilengkapi oleh peserta pemilu dan dapat juga dijadikan sebagai bahan rekomendasi oleh akuntan publik ketika melakukan audit.

Rekomendasi : Penguatan KPU

- **Pertama;** KPU harus menegakkan peraturan yang dibuatnya sendiri tentang batas akhir laporan, Jika terdapat partai politik ataupun DPD yang melaporkan melebihi dari waktu tersebut, KPU harus berani memberikan sanksi.
- **Kedua;** Kualitas pelaporan dari hampir semua partai politik tidak mendapatkan respon yang berarti dari KPU dan Bawaslu, baik dalam konteks meminta Partai Politik untuk merubah laporan dana kampanyenya maupun mengkonfirmasi kesalahan format yang nampaknya seragam di semua partai politik.
- **Ketiga;** KPU harus mau membuka ke publik parpol mana saja yang sebenarnya belum layak laporannya diterima dan harus diperbaiki. Hal ini harus dilakukan di tingkat pusat dan tingkat daerah agar proses pelaporan dana kampanye benar-benar sesuai dengan ketentuan dan membuktikan aspek transparan dalam pemeriksaan pelaporan awal dana kampanye ini.
- **Keempat;** KPU harus memperhatikan kemungkinan siasat pelaporan yang dilakukan oleh peserta Pemilu, seperti manipulasi atas plafon sumbangan dan upaya menyembunyikan identitas penyumbang.
- **Keenam;** Perlu dipertanyakan juga terkait keinginan KPU menegakan akuntabilitas pendanaan kampanye partai politik dan kandidat melalui keharusan memiliki rekening khusus dana kampanye. Termasuk kerjasama dengan PPATK, KPK dalam upaya mencegah praktik korupsi sumber dana kampanye.
- **Ketujuh;** Bawaslu harus lebih serius melakukan pemantauan dana kampanye dan membekali pengawasnya dengan materi pengawasan yang cukup agar bisa menemukan temuan dalam proses ini.

Selanjutnya Moderator mempersilahkan Bapak danielzuhron dari Bawaslu

**Syamsudin Haris (LIPI) –
Narasumber :**

- Kekuatan demokrasi adanya di civil society itu adalah aset kita,
- Mengapa demokrasi kita berbeda dibandingkan dengan Thailand yang bolak balik kudeta, demokrasi ini harus kita kawal, tanpa civil society demokrasi akan terancam oleh kekuatan merah putih, potensi demokrasi kita dibajak melalui pilkada, pembajakan oleh yang tidak suka dengan demokrasi yang kita capai, momentum undang-undang pilkada , koalisi merah putih sikap perilaku politisi akibat kekalahan pilpres, yang mengusulkan pilkada melalui DPR justru pemerintah aneh juga pemerintah, yang mengusulkan adalah Gamawan Fauzi.
- Saya tulis di twitter di FB bahwa dampak Pilkada melalui DPRD tertutup nya pemantauan dari sukarelawan dan oleh publik tidak mungkin kita melakukan pemantauan didalam gedung mau tidak mau Pilkada melalui DPR harus ditolak,
- Kita tidak mungkin memberikan kepercayaan kepada partai2 politik yg sedang krisis untuk mekanisme pilkada oleh rakyat,
- Pada saat ini rakyat sedang mengalami krisis kepercayaan, dalam situasi partai-partai politik tidak adanya tradisi kaderisasi tidak adanya institusionalisasi dengan realitas.
- Pelanggaran pemilu, pidana minded, politisi kita yang menghasilkan undang-undang pemilu tidak sungguh-sungguh membangun sistem penegakan hukum pemilu yang transparan akuntabel dst,

- Pasal-pasal mengenai pidana mestinya bisa diantisipasi, prosedur nya juga tidak harus sama dengan kepolisian, pengadilan dan kejaksaan, pemantauan pemilu untuk hasil yang spesifik terkait dengan terminologi pelanggaran pemilu, disalurkan melalui bawaslu.

Urgensi Pilkada Langsung

- Perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila (khususnya sila ke-4) dan Pembukaan UUD Negara RI 1945;
- Agar kepala-kepala daerah dan wakilnya lebih bekerja untuk rakyat ketimbang parpol yang mengusungnya;
- Untuk menghindari oligarki penentuan pasangan calon oleh segelintir elite parpol;
- Untuk menghindari potensi munculnya pemerintahan daerah yang kolusif dan transaksional yang pada akhirnya hanya berujung pada korupsi dan penyalahgunaan dana publik (APBD);
- Sebagai konsekuensi logis pilihan atas sistem presidensial, pilkada langsung oleh rakyat adalah suatu keniscayaan politik;
- Mengingat kabupaten/kota dan provinsi adalah daerah otonom maka kepala daerah/wakil harus dipilih langsung agar memiliki mandat dan legitimasi politik yang kuat;
- Agar rakyat memiliki akses dan turut berpartisipasi dalam menentukan masa depan daerahnya masing2;
- Dampak negatif pilkada langsung masih bisa diatasi dengan membenahi regulasi & menata pencalonannya tanpa harus mengubah mekanisme pemilihan langsung;

Jika Pilkada melalui DPRD

- Pilkada oleh DPRD adalah suatu kemunduran serta penghinaan terhadap kedaulatan rakyat seperti berlaku selama lebih dari 30 tahun Orde Baru;
 - Pilkada oleh DPRD sama saja dengan “jeruk memilih jeruk”, karena DPRD adalah unsur Pemda bersama-sama dengan kepala daerah. Tidak masuk akal jika unsur Pemda dipilih oleh unsur Pemda lainnya, kecuali barangkali dalam skema sistem parlementer;
 - Pilkada oleh DPRD harus ditolak karena tidak hanya melembagakan oligarki partai tetapi juga merampas suara & hak konstitusional rakyat;
 - Pilkada oleh para politisi DPRD yang menggadaikan SK-SK pengangkatan mereka sebagai anggota Dewan? Oh tidak!!! Mau dibawa ke mana negeri ini?
- Dampak Pilkada oleh DPRD**
- Pemda-DPRD jadi sangat kolusif dan transaksional yg akhirnya berujung korupsi. Jadi, selama 5 thn kepala daerah hanya melayani parpol dan politisi DPRD, kepentingan publik tidak terurus;
 - Terjadi pembajakan demokrasi krn kedaulatan rakyat digantikan kedaulatan elite. Oligarki dan kartelisasi parpol menguat shgg akses dan partisipasi publik dlm politik merosot drastis;
 - Politik dinasti justru bertambah subur, begitu jg fenomena 'orang kuat lokal' malah tambah marak;
 - Politik dan pemerintahan akhirnya menjadi arena permainan para elite parpol, sementara rakyat pembayar pajak hanya menjadi penonton;



Diskusi Publik

- Tidak ada peluang munculnya tokoh atau kandidat perseorangan (independen) sebagai kepala daerah;
- Selain itu, kesempatan bagi tokoh2 terbaik daerah utk maju dan bersaing dalam pilkada semakin terbatas dan dibatasi parpol;
- Tertutup peluang pemantauan dan pengawasan sukarela oleh publik, sehigga prinsip transparansi proses pilkada tidak terpenuhi jika pemilihan oleh DPRD;
- Tujuan efisiensi yang hendak dicapai dengan Pilkada oleh DPRD tidak akan tercapai karena (1) dari segi biaya belum tentu lebih murah; (2) kalaupun lebih murah, hal itu belum tentu sebanding dengan potensi kerusakan yang diakibatkannya nya: demokrasi merosot dan menjadi sangat oligarkis, korupsi terstruktur, sistematis dan massif;

Perbaikan Pilkada Langsung

- Membenahi format Pilkada, termasuk mewajibkan parpol melakukan seleksi internal kandidat yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
- Perlu mekanisme uji publik yang dilakukan oleh KPU/D (atau lembaga yg ditunjuk KPU/D) bagi setiap kandidat agar benar2 memiliki kapabilitas dan juga pemahaman atas persoalan daerah;
- Pembatasan biaya kampanye dan saksi, antara lain dengan pembiayaan kampanye dan saksi oleh negara;
- Mendorong parpol agar memperketat proses seleksi kandidat dalam Pilkada, sehingga benar-benar atas dasar kompetensi dan kapabilitas;
- Menata ulang pilkada sbg bagian pemilu lokal (serentak dengan pemilihan DPRD) dan dilaksanakan 2,5 tahun setelah pemilu nasional (pilpres dan pileg nasional);

Selanjutnya Ratna Arianti (AJI) selaku moderator mempersilahkan peserta untuk memberikan tanggapan .

(continued)

Tanggapan Peserta :

Titi Anggraini – Perludem :

- Demokrasi itu bukan hal yang final kita harus terus lanjutkan
- Setelah pemilu lahir lah RUU Pilkada, kalau kita tidak sabar berdemokrasi maka kita akan tergodanya dengan situasi,
- Ada kelompok elite yang menginginkan kita kembali ke masa lalu, pembelajaran pemantauan pileg 2014 bahwa kerja offline tidak akan menemukan maknanya yang maksimal kalau tidak didukung dengan kerja online contoh baliho yang dipasang secara besar-besaran,
- Apapun alat instrument online apabila tidak didukung dengan pendekatan melalui offline masyarakat akan mudah lupa,
- Kita menggarap offline dengan tidak melupakan yang online itulah benang merahnya,
- Tantangan terbesar dari setiap pemilu adalah inovasi menggarap yang online dengan tidak melupakan yang offline supaya maknanya lebih optimal karena pemilu kita adalah inovasi,

- Inovasi ini harus diimbangi sesuatu yang kuat, diimbangi infrastruktur dan inovasi dari penyelenggara, inovasi yang sama dengan masyarakat adalah inovasi yang sangat luar biasa, penyelenggaranya hanya itu-itu saja, kreatifitas inovasi lebih banyak di civil, dipemerintahan itu belum adanya inovasi.
- Kreatifitas atau inovasi dari kesukarelawan itu sangat luar biasa, dari mulai teater dll
- Besok akan ada demo 5000 masa dari anggota pemilu yang setuju Pilkada oleh DPRD kita bandingkan dengan demo yang dilakukan oleh sukarelawan yang hanya berjumlah 200 masa yang lebih inovatif pasti yang sukarelawan.
- Terkait penegakan hukum pengadilan adhoc pemilu, mengapa kita tidak memperkuat infrastruktur di bawaslu apabila dihentikan oleh bawaslu bola panas nya ada di bawaslu, apabila dhentikan oleh polisi bola panas nya ada di polisi,
- Gagasan singkatnya, bawaslu membiarkan masyarakat dengan gagasan dan kreatifitasnya memantau pemilu, bawaslu melakukan transformasi dengan merubah infrastruktur, merubah pengawasannya oleh masyarakat
- Untuk melakukan sengketa pemilu polisi tidak mengambil tanggung jawab tetapi harus terkonsolidasi dengan baik antara bawaslu, masyarakat dan polisi sehingga kedepan akan menjadi lebih baik.

Dita –Kemitraan :

- Kemitraan kita dengan satu dunia ada di 5 propinsi,
- Kita memantau dengan memberikan fomulir berisi apa saja yang harus dipantau, semua laporan kecurangan pemilu tidak bisa diselesaikan oleh panwas,
- Pelanggaran itu bisa dihentikan kita tidak bisa memaksa masyarakat harus menggunakan website terutama untuk yang didaerah-daerah, didaerah tidak bisa langsung lapor kepada panwas contoh di daerah Bali pelanggaran atau pemantauan tidak bisa ditindak lanjuti tetapi lebih kepada apresiasi

Inggrid – Demos :

- Penting membangun strategi offline dan online, esensi yang harus dbangun oleh anak muda dengan mengadakan diskusi dengan mengangkat persoalan anak muda diskusi dilakukan di kampus atau di sekolah bukan eksklusif seperti hari ini
- Mengajak anak-anak muda bertukar informasi, yang diluar jakarta jauh dari informasi politik dan belum tentu menggunakan gadget untuk kepentingan publik mereka menggunakan gadget untuk update status,
- Strategi online itu harus disambungkan dengan offline kita harus turun kejalan demi kepentingan publik harus ditunjukan ke publik, karena masyarakat juga yang terlibat dengan persoalan-persoalan publik, contohnya di jayapura sukarelawan tidak dibayar mereka hanya dikasi transport.
- Anak muda bisa dijadikan subjek dan objek untuk kepentingan politik itulah pentingnya pendidikan politik secara kekeluargaan.

Tanggapan Narasumber :

Anwari Natari (Satudunia) – Narasumber :

- Yang sudah dilakukan oleh satu dunia adalah kita sudah melakukan FGD baik formal maupun informal, berdiskusi dan tanya jawab misalnya apa yang membuat kalian memilih si A, kenapa tidak peduli dengan pemilu, apa yang menarik buat kalian bagaimana supaya anak muda tertarik dengan pemilu, kenapa harus peduli dengan pemilu
- Pada waktu pileg soal eksekusitas diskusi mengajak anak muda dengan pendekatan masuk ke pergaulan mereka misal dengan menggunakan bahasa gaul yang sedang IN dll

Daniel Zuhron (Bawaslu) – Narasumber :

- Bawaslu tidak melakukan tindakan dengan online karena untuk menghindari kasus yang tidak jelas,
- Ketika ada pelanggaran tidak ditindak lanjuti bukan berarti tidak ditanggapi.
- Pemilu itu pada dasarnya harus direspon dengan cepat, untuk anak muda bawaslu hadir dengan mengajak turut serta memantau
- Apabila ada pelanggaran diminta untuk segera dilaporkan,
- Hukum kita ini belum ada perkembangan mangkannya kita melakukan terobosan-terobosan, kita mengundang untuk diskusi seputar adanya RUU Pilkada, contoh terakhir adalah gugatan ke MK
- Sedangkan dari peserta pemilu sengketa tidak ada kecuali pelaporan dana kampanye,
- Belum semua memahami bahwa persoalan hukum bisa selesai ditempat atau tidak bisa ditindak lanjut, hukum kita masih primitif tidak update.

Muhammad Afifuddin (JPPR) –Narasumber :

- Untuk evaluasi di NTT bekerjasama dengan para pendeta disana dan itu sangat efektif untuk membangkitkan semangat anak muda dan membangun romantismen politik ,
- Kita membangun online dan offline dengan menggunakan key person, semua tahapan dipantau kita mempunyai ceklist-nya apa saja yang harus dipantau, menjadikan laporan supaya bisa ditindak lanjuti karena jiwa kita untuk mengawal demokrasi yang sangat penting.

Syamsudin Haris (LIPI) – Narasumber :

Pemilih muda adalah pemilih pemula, pemilih muda ada bermacam-macam ada pemilih di perkotaan, pedesaan, pesantren dan skema pendekatannya berbeda-beda bisa melalui smartphone, media social dll, pemantauan sukarela adalah melau media terutama adalah media online, yang dipantau adalah penyelenggara pemilu-nya dan memperhatikan apakah adanya pelanggaran selama pemilu berlangsung.

- Selesai -